

EBOLA DAN ANCAMAN KEAMANAN NON-TRADISIONAL DI ASEAN

Dewi Amelia Tresna Wijayanti*

Naskah diterima: 6 Oktober 2014

Naskah direvisi: 17 November 2014

Naskah disetujui: 21 November 2014

Abstract

Global community currently faces the dangerous spread of Ebola endemic. This essay discusses the threat of Ebola outbreak as one of non-traditional security issues and the need for regional organizations to consider new concept in the multilateral cooperation to combat the threat. The results of this descriptive analysis reveals that the Ebola outbreak, as a non-traditional issue, is a catalyst for a more formal and institutionalized security cooperation amongst ASEAN countries.

Keywords: non-traditional security, Ebola epidemic, regional cooperation, ASEAN, security threat

Abstrak

Masyarakat global saat ini menghadapi ancaman bahaya meluasnya wabah Ebola. Tulisan ini membahas ancaman wabah Ebola sebagai bentuk ancaman keamanan non tradisional dan perlunya organisasi regional di kawasan Asia Tenggara untuk mempertimbangkan dan melakukan gagasan baru dalam bentuk kerjasama multilateral untuk menanggulangi ancaman tersebut. Hasil analisa deskriptif ini menunjukkan bahwa wabah Ebola, sebagai ancaman keamanan non tradisional dapat menjadi katalis bagi terciptanya bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang keamanan yang lebih formal dan terinstitusionalisasi.

Kata Kunci: keamanan non-tradisional, wabah Ebola, kerjasama regional, ASEAN, ancaman keamanan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sidang Umum PBB ke 69 di akhir September 2014 diselenggarakan dalam bayang-bayang kekhawatiran dunia akan meluasnya penyebaran virus Ebola. Ebola diklasifikasikan sebagai salah satu ancaman keamanan non-tradisional (*Non-traditional Security Issue*) yang urgensi penanganannya dijadikan Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu pembahasan utama tahun 2014. Sejak virus Ebola pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976, belum pernah terjadi wabah Ebola yang demikian luas dan ganas seperti epidemi yang terjadi di tahun 2014. Wabah Ebola menyebar keluar kawasan Afrika Barat hingga Afrika Timur dan Afrika Tengah. Menjelang akhir tahun 2014 lebih dari 4000 orang, termasuk sejumlah petugas medis telah meninggal akibat penyakit Ebola. Kasus

meninggal akibat Ebola saat ini telah melebihi total jumlah korban semua wabah penyakit menular yang pernah terjadi sebelumnya.¹ Peningkatan pesat jumlah penderita Ebola di kawasan Afrika saat ini diakibatkan kurangnya kapasitas sistem kesehatan masyarakat untuk penanganan penyebaran virus di wilayah tersebut.

Presiden Amerika Serikat Obama dalam sambutannya di hadapan Sidang Umum PBB ke-69 pada tanggal 29 September 2014 menyatakan dunia saat ini berada dalam persimpangan antara perang dan damai, keteraturan dan disintegrasi, serta harapan dan ketakutan.² Obama menempatkan Ebola setara dengan agresi Rusia di Eropa dan keberadaan kelompok ekstrimis *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* sebagai ancaman terbesar bagi perdamaian dan keamanan dunia. Organisasi

* Tenaga Ahli Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, Email: amelia_wijayanti@yahoo.com.

¹ *Ebola outbreak deaths pass 5,000*, <http://www.bbc.com/news/world-africa-30028859>, diakses pada 2 November 2014.

² Remarks by President Obama in Address to the United Nations General Assembly, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/24/remarks-president-obama-address-united-nations-general-assembly>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2014.

internasional harus bergerak cepat dan meningkatkan konsolidasi karena Ebola bukan lagi sekedar isu kesehatan tetapi telah meluas menjadi ancaman keamanan regional dan global.³ Kegagalan sistem internasional untuk berpacu dengan dunia yang semakin terkoneksi satu sama lain. Epideminya yang meluas di sebuah negara akan melemahkan kapasitas pemerintah untuk melanjutkan program pembangunan, menyebabkan runtuhnya kegiatan ekonomi dan destabilisasi di seluruh wilayah yang terdampak penyakit tersebut. Sehingga, wabah Ebola tidak dapat disangkal lagi menjadi sebuah ancaman yang serius bagi keamanan suatu negara.⁴

Perluasan penyebaran Ebola juga menjadi perhatian parlemen-parlemen di kawasan Asia Tenggara, Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang periode 2009-2014, Dr. Pramono Anung Wibawa, dalam pemandangan umum yang disampaikannya di hadapan parlemen-parlemen negara anggota ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) di Vientiane-Laos pada bulan September 2014, menyatakan meskipun penyebaran virus Ebola belum mencapai dataran Asia Tenggara negara-negara di kawasan ini harus meningkatkan kewaspadaan dan kerja sama dalam mencegah penyebaran virus tersebut. Ebola menjadi salah satu fokus hasil Sidang Umum AIPA tahun ini dengan titik berat pada peran anggota parlemen dalam mendorong pemerintah masing-masing untuk meningkatkan kerja sama kewaspadaan dan tindakan pencegahan di perbatasan. Ebola bukan hanya menjadi isu kesehatan masyarakat tetapi telah menjadi isu keamanan regional. Kerja sama antar negara anggota ASEAN dalam hal lalu lintas di perbatasan harus ditingkatkan, terutama saat ASEAN tengah menyongsong terbentuknya Komunitas ASEAN 2015.

³ Remarks by President Obama at U.N. Meeting on Ebola, <http://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2014/09/25/remarks-president-obama-un-meeting-Ebola>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2014.

⁴ WHO, WHO welcomes decision to establish United Nations Mission for Ebola Emergency Response, <http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/ebola-emergency-response/en/>, diakses pada 12 November 2014; Pearson, J., *Asia must do more to help global Ebola fight*, Jakarta Post edisi 5 November 2014, h.10.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan keamanan terjadi ketika muncul sebuah potensi maupun bentuk ancaman yang mengganggu nilai-nilai fundamental sebuah individu, kelompok, komunitas, bangsa, kelompok bangsa, atau komunitas internasional. Nilai fundamental yang ada pada sebuah individu atau kelompok adalah hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi, identitas individu dan komunal, pembangunan rohani, pemenuhan kesejahteraan, perlindungan terhadap kelangsungan hidup, kesehatan, lingkungan serta pembangunan berkelanjutan di sekitar individu atau kelompok tersebut. Sedangkan nilai-nilai fundamental yang terkait dengan sebuah negara adalah kedaulatan nasional, integritas teritorial, dan kemerdekaan negara tersebut dalam berpolitik.⁵ Seiring dengan semakin memudarnya garis batas antar negara, permasalahan keamanan di suatu negara memberikan efek domino bagi beberapa negara yang mengalami interkoneksi satu sama lain.

Tulisan ini dibuat untuk menelaah respon internasional dan tantangan kerjasama internasional di kawasan Asia Tenggara terhadap Ebola dalam kaitannya sebagai salah satu bentuk ancaman keamanan non-tradisional. Oleh karena itu, pertama-tama perlu diketahui bentuk ancaman keamanan non-tradisional yang dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan suatu wilayah, atau arti dari keamanan itu sendiri, aspek-aspek apa yang mendapat ancaman non-tradisional dan hal-hal apa yang mengancam aspek-aspek tersebut. Pertanyaan lain yang muncul dalam masalah ini adalah siapa yang diharapkan dapat memberikan perlindungan atau keamanan terhadap ancaman itu dan bagaimana upaya perlindungan/keamanan terhadap ancaman epidemi Ebola ini dapat mendorong terciptanya kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara yang lebih baik dari sebelumnya.

⁵ Thakur, R., *From National to Human Security* pada Stuart Harris dan Andrew Mack, *Asia-Pacific Security: The Economics-Politics Nexus*, Sydney: Allen and Unwin, 1997, h. 52-80; Newman, E., *Human Security and Constructivism*, *International Studies Perspectives*, Vol. 2, No. 3, 2001, h. 239-251.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai Ebola sebagai ancaman non-tradisional. Tulisan ini ditulis dengan pendekatan deskriptif analitik melalui tinjauan pustaka. Diharapkan tulisan ini dapat menjadi masukan bagi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI terutama karena Ebola menjadi salah satu pembahasan penting dalam Sidang Umum ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-35 tahun 2014.

D. Landasan Teori

Pendapat yang umum dipakai dalam pembahasan teori tentang keamanan adalah teori sekuritisasi yang dipelopori oleh Barry Buzan, Ole Weaver, dan Jaap de Wilde. Teori ini berpandangan bahwa keamanan adalah suatu kemampuan untuk mempertahankan diri dalam menghadapi ancaman yang nyata. Teori ini juga menjelaskan bahwa masalah keamanan merupakan hasil konstruksi. Artinya, setiap isu dapat berubah menjadi isu keamanan bila isu tersebut telah diterima oleh masyarakat luas sebagai hal yang dapat mengancam kondisi keamanan mereka.⁶

Dalam pembahasan tentang konsep keamanan selanjutnya dikenal dua bentuk permasalahan keamanan, yakni permasalahan keamanan tradisional dan non-tradisional. Bagian ini akan membahas perbedaan diantara sumber masalah keamanan tradisional dan non-tradisional tersebut.

Pandangan tradisional keamanan nasional lebih banyak dibahas dalam pendekatan hubungan internasional secara realistis. Dari perspektif pembuat kebijakan, kedaulatan nasional, integritas teritorial, dan kemerdekaan politik negara adalah nilai-nilai fundamental yang harus dilindungi dan adalah tugas mereka untuk melihat ancaman terhadap nilai-nilai itu sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Beberapa ancaman dapat berasal dari warga negara itu sendiri, seperti ancaman

untuk mendelegitimasi pemerintah yang sedang berkuasa, perang saudara, dan hal-hal lain yang mengancam masyarakat yang semestinya dilindungi oleh pembuat kebijakan. Ketidakmampuan untuk memenuhi tantangan tersebut, dapat dilihat sebagai ancaman keamanan nasional. Oleh karena itu, negara yang tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menghadapi tantangan keamanan nasional dapat dilihat sebagai negara yang lemah. Bagaimanapun, tantangan terhadap keamanan nasional lebih sering dipandang sebagai ancaman yang berasal dari luar negeri. Yang paling dikhawatirkan adalah isu yang ditimbulkan oleh penggunaan militer atau ancaman penggunaan militer oleh negara lain untuk mengusik kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kemerdekaan politik suatu negara.⁷

Perhatian pendukung aliran tradisional umumnya difokuskan terutama pada ancaman yang bersifat militer terhadap negara dari sumber eksternal. Perkembangan dalam negeri sendiri sebetulnya sudah cukup mengancam kelangsungan pembangunan atau stabilitas suatu negara, namun perhatian realistis cenderung diarahkan pada ancaman eksternal. Pandangan ini juga cenderung menekankan respons militer, atau tindakan balasan non-militer, misalnya, sanksi politik dan ekonomi, terhadap sumber ancaman tersebut. Sesuai dengan rujukan tersebut, maka jenis ancaman terhadap keamanan nasional seperti itulah yang diistilahkan sebagai keamanan tradisional.⁸

Sebaliknya, pendekatan keamanan non-tradisional beranggapan bahwa tindakan pengamanan tidak hanya mencakup perlindungan fondasi negara dari ancaman eksternal tetapi juga harus meliputi perlindungan nilai-nilai masyarakat. Di antara nilai-nilai yang harus menjadi perhatian adalah hak asasi manusia, pengakuan identitas individu dan masyarakat, pembangunan spiritual, kesejahteraan masyarakat, perilaku sosial dan budaya suatu kelompok etnis, kesehatan individu

⁶ Buzan, B., Ole, W. and de Wilde, J., *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder: Lynne Rienner, 1998, h. 21-24.

⁷ Nye, J. S. *Soft Power*, Foreign Policy, 1990, h. 153-171.

⁸ King, G., dan Murray, C. J., *Rethinking Human Security*. Political Science Quarterly, Vol. 116 no. 4, . 2001, h. 585-610.

dan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan.⁹ Untuk tujuan diskusi disini, perlindungan terhadap nilai-nilai tersebut diatas selanjutnya dipandang sebagai jaminan keamanan yang bersifat non-tradisional.

Perbedaan pandangan tentang keamanan mungkin juga merupakan hasil dari pengalaman sejarah yang dialami oleh sebuah kelompok atau suatu negara. Sebagian besar masyarakat menggunakan pengalaman sejarah sebagai titik batas keamanan mereka. Sebagai contoh, hampir semua negara-negara Asia Timur, misalnya, menganggap awal dan akhir Perang Dunia II, awal dan akhir dari Perang Dingin sebagai bagian dari kehidupan sejarah negara mereka. Bagi banyak orang-orang di kawasan itu, warisan Perang Dunia II dan Perang Dingin, telah mengakibatkan berbagai masalah keamanan yang terus muncul hingga beberapa dekade kemudian. Di antara isu-isu tersebut adalah isu pemisahan penduduk seperti antara penduduk Tiongkok daratan dan Hongkong, antara penduduk Korea Utara dan Korea Selatan, sengketa teritorial yang belum diselesaikan seperti di Rusia, Jepang, dan Tiongkok; kompensasi untuk penderitaan manusia dan kerugian material yang diakibatkan tindakan penjajahan, misalnya, di Cina dan Korea; dan kehadiran pasukan militer asing di dekat perbatasan negara, misalnya di China, Jepang, dan Korea.¹⁰

Penduduk di kawasan Asia Timur juga mengkhawatirkan berbagai isu yang muncul akibat dari kondisi sejarah dan sosial budaya di kawasan tersebut. Isu-isu itu antara lain adalah: masalah lingkungan hidup, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan pendapatan, masuknya migran asing, perdagangan senjata, obat-obatan, dan manusia ilegal, penyebaran AIDS / HIV, serta dislokasi sosial dan ekonomi dan sosial. Isu-isu non tradisional tersebut juga muncul sebagai akibat dari arus globalisasi yang mengganggu

tata cara hidup dan mengusik rasa aman mereka. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk ancaman keamanan lain yang serius di kawasan tersebut.¹¹

Sesuai dengan teori Sekuritisasi yang dipelopori oleh Buzan dan kawan-kawan, suatu isu menjadi masalah keamanan karena ada aktor-aktor yang mewacanakannya dengan mengatakan bahwa isu tersebut merupakan ancaman eksistensial bagi suatu entitas. Dengan demikian, tanggapan masyarakat tentang suatu fenomena tertentu sebagai masalah keamanan akan tergantung pada apakah para pemimpinnya mengadopsi pandangan hubungan internasional (dan keamanan nasional) yang berpusat pada negara atau pandangan liberal yang mencakup masalah keamanan seorang manusia.

Konsep keamanan manusia dikaitkan pada hal-hal yang berhubungan dengan mata pencaharian dan pembangunan manusia. Konsep keamanan ini dimulai dari pemahaman bahwa perdamaian tidak hanya milik Negara atau masyarakat, tetapi untuk setiap anggota dari komunitas tersebut. Kedaulatan Negara tidak lagi bisa digunakan sebagai alasan bagi pelanggaran hak asasi manusia.¹² Berbagai peneliti telah membahas teori dan pembahasan tentang pergeseran penekanan dalam wacana keamanan dari nasional ke keamanan warga.¹³ Namun, definisi keamanan manusia pada dasarnya adalah adalah “bebas dari rasa takut “dan” kebebasan dari keinginan”.¹⁴ Ini meliputi keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan komunitas, dan keamanan politik.¹⁵

⁹ Thakur, R., 1997; Newman, E., 2001, *loc. cit.*

¹⁰ Hu, W., “*Economic and Security Cooperation in Northeast Asia: A Chinese Perspective*”, dalam *Politics and Economics in Northeast Asia: Nationalism and Regionalism in Contention*. Tsuneo Akaha (ed) New York, NY: St. Martin's Press, 1999.

¹¹ Cossa, Ralph A., dan Khanna, Jane, *East Asia: Economic Interdependence and Regional Security*, International Affairs, Vol. 73 no. 2, 1997, h. 219-234.

¹² Annan, K., 2002, “*We Can Love What We Are, Without Hating What—and Who—we Are Not*” Secretary-General Says in Nobel Lecture”, SG/SM/8071, December 10, 2001. <http://www.un.org/News/Press/docs/2001/sgsm8071.doc.htm>, diakses 6 September 2014.

¹³ Newman, E. *loc.cit*; Thakur, R., *loc.cit*; Van Ginkel, H. dan Newman, E., *In Quest for 'Human Security'*, Japan Review of International Affairs, Vol. 14, no. 1, 2000, h. 59-82.

¹⁴ United Nations Development Programme, *Human Development Report 1994*. New York and Oxford: Oxford University Press, 1994.

¹⁵ *Ibid.*

Jadi, dapat dilihat bahwa perbedaan antara keamanan tradisional-non-tradisional dan keamanan negara-manusia dibuat dalam dimensi yang berbeda dan digunakan untuk mencapai tujuan yang sedikit berbeda. Keamanan tradisional tentu mencakup masalah-masalah keamanan nasional suatu negara, yang mencakup beberapa masalah keamanan manusia, misalnya, revolusi, perang sipil, atau invasi negara asing yang secara langsung mengancam kelangsungan hidup warga penduduk di suatu negara. Di sisi lain, masalah keamanan non-tradisional, misalnya, kerusakan lingkungan, migrasi yang tidak terkendali, dan pengelolaan perekonomian nasional yang buruk, dapat juga mengancam stabilitas negara serta nilai-nilai masyarakat dan hak-hak individu warga negara yang bersangkutan.

Di kawasan Asia Tenggara sendiri, tantangan terhadap keamanan non-tradisional muncul dari permasalahan-permasalahan transnasional sebagai berikut; pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang mempengaruhi kesehatan manusia, perdagangan narkoba dan obat terlarang, kegiatan jaringan terorisme, penyelundupan dan perdagangan manusia, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan kesenjangan ekonomi di antara negara-negara di kawasan tersebut. Masalah-masalah keamanan non-tradisional di negara-negara Asia Tenggara, termasuk masalah keamanan manusia, merupakan masalah yang membutuhkan kerja sama internasional, termasuk kerjasama multilateral.¹⁶

II. PEMBAHASAN

A. Era Globalisasi dan Isu Keamanan Non-Tradisional

Isu-isu keamanan non-tradisional merupakan refleksi dari perubahan yang terkait dengan globalisasi. Pergeseran konsep persemakmuran ala Keynesian dan proses transformasi politik di seluruh dunia telah

¹⁶ Acharya A., *Culture, Security, Multilateralism: the "Asean Way" and Regional Order*, di Krause K (ed) *Culture and security, multilateralism, arms control and security building*. Frank Cass, London, 1999.

merombak skala kebijakan suatu pemerintahan. Perubahan ini kemudian memunculkan sebuah ruang lingkup, batas imajiner, dan pola hubungan baru dalam penataan ulang tata laksana keamanan di berbagai negara.

Dalam beberapa dekade setelah Perang Dunia II, semangat nasionalisme setiap negara sangatlah dominan. Para pendukung paham ekonomi Keynes menegaskan perlunya pengutamaan nilai uang nasional di atas mata uang internasional dan pemenuhan kebutuhan warga negara dan domestik sebagai dasar kebijakan ekonomi suatu negara. Prioritas ini tercermin dalam usaha-usaha untuk mendukung keunggulan ekonomi nasional, kesejahteraan bagi warga negara yang pengelolaannya sepenuhnya digunakan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan suatu negara.¹⁷ Di tingkat internasional, hal ini tercermin dari tekad yang kuat untuk menegakkan kedaulatan negara dan batas wilayah yang ada, termasuk yang diwariskan kepada negara-negara yang terbentuk pasca era penjajahan,¹⁸ dan adanya pemahaman tentang keamanan internasional sebagai bentuk kerja sama antar negara yang hanya disetujui saat dibutuhkan.

Namun, tahun 1970-an terjadi krisis pada sistem kapitalisme Barat. Anjloknya standar emas pada tahun 1971 diikuti oleh liberalisasi ekonomi yang cepat, diperkuat oleh terbentuknya pemerintahan Presiden Reagan di Amerika dan Perdana Menteri Thatcher di Inggris. Di era pemerintahan Reagan dan Thatcher tersebut, kebijakan ekonomi dirancang guna untuk liberalisasi ekonomi, privatisasi, perdagangan bebas, pasar terbuka, deregulasi, serta pengurangan anggaran belanja pemerintah dalam rangka meningkatkan peran sektor swasta dalam perekonomian. Dampak kebijakan kedua pemerintahan tersebut, terutama penitikberatan pada privatisasi dan

¹⁷ Jessop, B., *Avoiding Traps, Rescaling States, Governing Europe. In Leviathan Undone? Towards a Political Economy of Scale*, Vancouver: UBC Press, 2009.

¹⁸ Barkin, J. S. dan Cronin, B., *The State and the Nation: Changing Rules and the Norms of Sovereignty in International Relations*. International Organization, Vol. 48 no.1, 1994, h. 107-130.

globalisasi, sangat mempengaruhi perekonomian dunia hingga saat ini.

Reformasi kebijakan ini awalnya digunakan untuk mempersiapkan penduduk negara Amerika Serikat dan Inggris dalam menghadapi kompetisi internasional. Namun, banyak pihak memandang bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk melemahkan pengaruh kaum buruh di pemerintahan dan lebih menguntungkan sekelompok pengusaha dan pemain saham demi mendorong terciptanya akumulasi modal di tingkat global.¹⁹

Ekspansi ekonomi, pasar bebas dan globalisasi diatas telah “menisbikan” skala nasional suatu pemerintahan. Akibatnya, permasalahan politik, ekonomi atau keamanan kini tidak lagi dapat dikelola secara terpisah-pisah dan apa adanya. Permasalahan krusial terkadang justru berasal dari sebuah ruang yang ada di luar jangkauan kekuasaan sebuah negara. Hal tersebut mendorong negara-negara di sebuah kawasan untuk bekerjasama dalam memecahkan suatu permasalahan regional.²⁰ Reformasi kebijakan pemerintahan juga mendorong pemerintahan daerah untuk bekerja sama langsung dengan lembaga-lembaga internasional. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Toronto menjalin kerja sama sama langsung dengan WHO guna merancang tata kelola kesehatan saat terjadinya wabah SARS di tahun 2003.²¹

Reformasi kebijakan serupa juga terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia, Afrika dan kawasan Pasifik. Di kawasan Asia, transformasi pemerintahan ditujukan guna mendukung pembangunan nasional dan memperkuat ketahanan negara terhadap krisis ekonomi melalui transnasionalisasi dan regionalisasi jaringan produksi serta kelonggaran

perijinan bagi investor asing.²² Sebagai kawasan yang tidak stabil. Proses transformasi pemerintahan di kawasan Afrika dan kawasan Pasifik dibantu oleh pemerintahan negara Barat sebagai sebuah upaya untuk meminimalisasi risiko keamanan yang dapat timbul sebagai akibat dari ketidakstabilan sosial dan politik di kedua kawasan tersebut.²³

B. Isu Keamanan Non-Tradisional dan Organisasi Regional

Kaidah politik isu keamanan non-tradisional merupakan manifestasi dari proses transformasi suatu negara. Perumusan isu keamanan non-tradisional sebagai permasalahan transnasional muncul secara alami dan penempatan masalah ini dalam peta dunia mencerminkan terjadinya relativisasi skala. Tindakan pengamanan terhadap isu transnasional terlegitimasi dan didorong oleh munculnya batas negara imajiner, di mana pemikiran dan identitas politik suatu negara perlu ditata ulang. Sebagian akibat dari tumbuhnya tekanan pasar global, para pendukung paham kapitalis dan manajer ekspatriat mendorong warga suatu negara untuk memahami dan menyesuaikan kehidupan sosial dan ekonomi mereka dalam konteks persaingan ekonomi global. Warga suatu negara dapat merasakan hidup sebagai bagian dari warga dunia dan menikmati hasil dari aliran dana pemodal kelas dunia di sekitar mereka. Hal ini ditunjang dengan berbagai presentasi di berbagai media massa dan publikasi akademis tentang konsep dunia yang makin datar dan meluas. Pengelola negara juga telah menerima dan menerapkan konsep batas negara imajiner ini ke dalam kelompok kerjasama antar negara, sebagai contoh diperkenalkannya konsep *ASEAN Economic Community* atau *European Identity*.

¹⁹ Harvey, D., *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford: Oxford University Press, 2005.

²⁰ Jessop, B. *loc.cit.*

²¹ Ali, S. H., dan Keil, R., *Public Health and the Political Economy of Scale: Implications for Understanding the Response to the 2003 Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Outbreak in Toronto*, Leviathan Undone? Towards a Political Economy of Scale, diedit oleh Roger Keil dan Rianne Mahon, Vancouver: UBC Press, 2009.

²² Jayasuriya, K., *Beyond Institutional Fetishism: From the Developmental to the Regulatory State*. *New Political Economy*, Vol. 10 no.3, 2005, h. 381–387.; Jayasuriya, K., dan Rodan G., *Beyond Hybrid Regimes: More Participation, Less Contestation in Southeast Asia*, *Democratization* Vol. 14 no. 5, 2007, h. 773–794.

²³ Hameiri, S., *Governing Disorder: The Australian Federal Police and Australia's New Regional Frontier*, *The Pacific Review* Vol. 22 no. 5, 2009, h. 549–574.

Di lain pihak, banyak LSM internasional memperkenalkan konsep kawasan biologi (*bioregions*) yang melintasi batas yurisdiksi domestik. Konsep ini mendorong warga negara untuk membayangkan dirinya berada pada sebuah ekosistem regional atau global.²⁴ Elit politik dan pemilik modal besar kelas dunia mempromosikan sebuah jaringan kota global, yang lebih terhubung dengan pusat-pusat perkotaan daripada dengan daerah pedalaman. Penggunaan konsep spasial imajiner yang melimpah, ditambah dengan penekanan yang kontemporer terhadap risiko hubungan internasional pasca perang dingin, menciptakan keterkaitan melintasi ruang dan tingkat kewaspadaan yang lebih besar terhadap perkembangan di berbagai tempat. Hal ini, baik secara implisit atau eksplisit, menggambarkan kebijakan pemerintahan berbasis nasional fundamental tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan yang dihadapi.

Namun, seperti proses transformasi negara itu sendiri, ada tidaknya tindakan peningkatan kesiagaan dari isu-isu keamanan non-tradisional pada akhirnya ditentukan oleh perjuangan antara kelompok yang mengangkat dan/atau berada di sekitar masalah yang bersangkutan. Kadang-kadang, proses ini berhubungan langsung dengan kepentingan atas akumulasi modal negara kapitalis dan karena itu sering terkait dengan konflik antara fraksi yang memiliki sponsor atau penyandang dana yang berbeda. Hal ini juga dapat dilihat pada kasus-kasus tata kelola pengamanan lingkungan hidup di berbagai negara. Perombakan ruang lingkup pemerintahan dapat menjadi suatu kebijakan politik di dalam konteks perundangan suatu negara, untuk menjaga legitimasi politik pemerintahan,²⁵ dan terutama untuk menunjukkan kapasitas pemerintah dalam mengelola berbagai tantangan keamanan non-

tradisional yang berkaitan dengan globalisasi.²⁶ Bentuk kerjasama dari berbagai keahlian ilmiah dan teknis yang spesifik, seringkali memainkan peran kunci dalam pengembangan solusi dan tata kelola isu keamanan non-tradisional, seperti kerjasama di bidang kejahatan *cyber* dan penyakit menular.²⁷ Mengatasi masalah tersebut telah menjadi komoditas politik yang penting untuk dibicarakan mengingat tumbuhnya konteks batas ruang imajiner dari masyarakat dunia.²⁸ Dengan bangkitnya perjuangan kelas bawah masyarakat sebagai salah satu kekuatan yang menggerakkan politik, elit politik juga semakin berusaha untuk memobilisasi dan menarik dukungan melalui kampanye mengenai rasa bebas dari takut dan ketidakamanan yang muncul akibat pola kehidupan sosial dan ekonomi kontemporer.²⁹

Hal yang sama terjadi pada organisasi regional seperti ASEAN dan Uni Eropa. Selama ini ASEAN dan Uni Eropa telah melakukan konseptualisasi keamanan dan mengatur isi dan prioritas agenda keamanan mereka sesuai dengan nilai-nilai khas dan konteks regional mereka sendiri. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir munculnya ancaman keamanan non-tradisional menandakan pergeseran mendasar dari cara kerja mereka yang konvensional. Turbulensi baru di pinggiran Uni Eropa membuka semakin banyak daerah bagi gelombang pengungsi dan gangguan perdagangan.³⁰ Banyaknya negara gagal dan konflik militer di Asia Tengah, Balkan dan Afrika Utara menjadi jalur transmisi imigrasi ilegal, kejahatan transnasional dan kegiatan kejahatan lainnya. Serangan teroris di Madrid

²⁴ Cooke, P., *The Evolution Of Biotechnology In Bioregions and Their Globalisation*. International Journal of Biotechnology, vol. 10, no. 5, 2008, h. 476-495.

²⁵ Purcell, M. dan Nevins J., *Pushing the Boundary: State Restructuring, State Theory, and the Case of U.S.-Mexico Border Enforcement in the 1990s*, Political Geography Vol. 24 no. 2: 2005, h. 211-235.

²⁶ Mabee, B., *The Globalization of Security: State Power, Security Provision and Legitimacy*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.

²⁷ Hansen, L., dan Nissenbaum H., *Digital Disaster, Cyber Security, and the Copenhagen School*, International Studies Quarterly Vol. 53 no. 4: 2009, h. 1155-1175; Elbe, S., *Security and Global Health: Towards the Medicalization of Insecurity*, Cambridge: Polity Press, 2010.

²⁸ Beck, U., *World Risk Society*, Cambridge: Polity Press, 1999.

²⁹ Furedi, F., *Politics of Fear: Beyond Left and Right*, London: Continuum, 2005.

³⁰ Biscop S., *The European Security Strategy: A Global Agenda for Positive Power*, Aldershot: Ashgate, 2005.

(2004), dan London (2005), yang terkait dengan kelompok garis keras dan fundamentalis agama, menempatkan keterbukaan dan keragaman masyarakat Uni Eropa pada posisi yang beresiko. Secara paralel, krisis keuangan 1997, Bom Bali 2002 dan 2005, bencana alam Tsunami, epidemi Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS), kehadiran kelompok teroris, seperti Jamaah Islamiah (JI), Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan Abu Sayyaf Group (ASG), dan kejahatan transnasional dan perdagangan ilegal, telah secara perlahan mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan negara-negara ASEAN dan telah sangat memperburuk hubungan antarnegara.

ASEAN selama ini mengemukakan istilah “*the ASEAN way*” dalam pengelolaan sengketa atau permasalahan keamanan yang terjadi pada negara anggotanya dan menganggap cara tersebut adalah cara yang paling sesuai dalam proses pengambilan keputusan dan pendekatan kelembagaan mereka. Archarya (1999) menyatakan bahwa cara ini sangat mencerminkan pendekatan musyawarah dan mufakat yang berasal dan jamak dilakukan oleh masyarakat desa di Jawa.³¹ Walaupun belum menyentuh kaidah formal dan institusional dalam kerjasama yang terlegitimasi, ASEAN tetap menerapkan gaya yang fleksibel, dan praktek bersosialisasi yang berdasarkan pada prinsip kehati-hatian, hubungan pribadi dan informal. Desain kelembagaan ASEAN ini mencerminkan keadaan historis dari negara anggotanya, yang sebagian besar merupakan negara-negara yang pernah mengalami masa penjajahan, dan upaya untuk mempertahankan kedaulatan nasional terhadap pengaruh eksternal. Sehingga, para pejabat di ASEAN cenderung untuk memilih bentuk kerjasama keamanan yang longgar dan non-interferensi.

Negara-negara anggota ASEAN juga memiliki perbedaan dalam hal sistem politik dan pemerintahan, tingkat pembangunan ekonomi, tradisi keagamaan dan budaya. Hal tersebut menjelaskan keengganan negara-negara tersebut terhadap setiap upaya kerjasama

penanggulangan krisis dan penerapan instrumen keamanan yang menyangkut perlintasan batas negara dan bersifat mengikat. Satu-satunya upaya untuk memberikan ASEAN suatu mekanisme formal pengelolaan konflik adalah dalam bentuk *Treaty of Amity and Cooperation*. Norma kerjasama ini mencerminkan pilihan ASEAN untuk meneruskan bentuk kerangka kerja institusional secukupnya sebagai bentuk komitmen negara-negara anggotanya terhadap kaidah solidaritas kedaulatan nasional, kerjasama dan penyelesaian sengketa yang damai, informal, minim pelembagaan, non-interferensi.³²

Model kerjasama ini terus diterapkan dalam pengelolaan keamanan antar negara di Asia Tenggara sampai akhir Perang Dingin. Setelah era tersebut usai, pengaruh peralihan kekuasaan dan proses demokratisasi di lima negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura) menyebabkan ASEAN untuk mulai mendefinisikan kembali peran regionalnya, dan menyusun kerangka kerjasama baru yang ditunjukkan dengan terbentuknya *ASEAN Regional Forum (ARF)*. Namun demikian, pengaruh etnis, politik, ekonomi dan ketegangan teritorial yang terus terjadi masih menjadi hambatan bagi negara anggota ASEAN untuk menyerahkan sebagian hak prerogatif dan kedaulatan mereka di bidang keamanan kepada ASEAN. Akibatnya ASEAN belum berhasil menyusun langkah penanggulangan krisis dalam sebuah mekanisme formal dan legal untuk dapat mengambil tindakan langsung di setiap negara anggotanya. Sebaliknya, pemerintahan negara anggota ASEAN tetap berpegang pada norma-norma yang ada pada “*the ASEAN way*” dan menolak setiap alokasi kompetensi dan perjanjian yang mengarah pada bentuk penanggulangan krisis yang diusulkan ASEAN tersebut.

Berbagai ancaman keamanan dan bencana alam yang terjadi sebetulnya telah menyadarkan ASEAN akan adanya sifat ketergantungan akan

³¹ Acharya, A., *Loc.cit*

³² Amer R, *The Asian peace. What is the role for the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)?*, International Studies Association, 49th Annual Convention, San Francisco; 2008.

pengelolaan keamanan dan tindakan langsung untuk menghadapi ancaman bersama. ASEAN mulai bekerja keras untuk menguraikan strategi keamanan baru dan berinovasi untuk mengubah pemikiran dan norma-norma kerjasama keamanan mereka. Pada ASEAN Bali Concord II, telah disetujui sebuah perjanjian ASEAN *Political Security Community* (APSC) yang menyoroti bahwa sejumlah faktor politik, ekonomi, lingkungan, dan sosial dapat mempengaruhi keamanan masyarakat dan individu dalam negara anggota ASEAN. Prinsip keamanan menyeluruh ini kemudian kembali ditekankan pada ASEAN *Charter*, sebuah perjanjian yang berfungsi sebagai dasar terbentuknya Komunitas ASEAN, ASEAN *Community*, melalui pemberian status hukum, wewenang, dan kerangka kerja kelembagaan yang baru kepada ASEAN.³³

Dalam perjalanan dekade ini, ASEAN telah mempromosikan kerangka regional untuk menangani masalah keamanan. Serangan teroris di berbagai negara ASEAN menghasilkan serangkaian langkah-langkah baru mengenai keamanan dalam negeri yang bertujuan untuk menyelaraskan persepsi norma teroris dan meningkatkan kerjasama intelijen,³⁴ dan peningkatan kapasitas pengelolaan untuk mencegah dan merespon terjadinya bencana, baik yang diakibatkan fenomena alam atau ulah manusia.³⁵ Sebagai bentuk penegakan APSC dan ASEAN *Charter*, ASEAN telah menyepakati penerapan ASEAN *Convention on Counter-Terrorism* (ACCT) sebuah dokumen yang menyelaraskan kerangka hukum negara anggota ASEAN dalam kerjasama melawan terorisme.

C. Selintas Mengenai Ebola

Penyakit Ebola, awalnya diidentifikasi pada tahun 1976 di Yambuku Republik Demokratik

Kongo dan Nzara Sudan Selatan. Penyakit ini disebabkan oleh virus RNA dalam keluarga Filovirus. "Ebola", dinamai dari sebuah sungai di Zaire, meliputi lima spesies terpisah, yakni: virus *Zaire Ebolavirus*, *Bundibugyo Ebolavirus*, *tai Forest Ebolavirus*, *Sudan Ebolavirus*, dan *Reston Ebola*. *Reston Ebolavirus* tidak pernah menyebabkan kasus penyakit pada manusia, tetapi wabah dari empat spesies virus yang lain memiliki tingkat kematian yang berkisar di antara 25-90%.³⁶ Jenis *strain* yang saat ini beredar di Afrika Barat diketahui memiliki tingkat homologi 97% dengan sampel *Zaire Ebolavirus* yang ditemukan di Republik Demokratik Kongo dan Gabon.³⁷ Jenis *strain* ini secara historis memiliki tingkat kematian tertinggi, yakni 90%, meskipun diperkirakan angka kematian dalam wabah saat ini kurang dari 60%.³⁸

Wabah penyakit Ebola diduga bersumber dari wadah atau *reservoir* hewan dan ditengarai juga melibatkan spesies hewan lain sebagai perantara. Peristiwa wabah selama ini menunjukkan kemungkinan *reservoir* kelelawar buah sebagai sumber dari wabah Ebola, meskipun belum ada konfirmasi pasti mengenai hubungan sebab-akibat yang terjadi. Penularan virus ke manusia dapat terjadi melalui kontak langsung dengan jaringan atau cairan tubuh dari hewan yang terinfeksi. Penyakit Ebola adalah penyakit pada hewan yang dapat ditularkan ke manusia atau disebut penyakit *zoonosis*. Sirkulasi virus Ebola di antara manusia sebetulnya jarang terjadi, sehingga dapat dikatakan wabah Ebola selalu datang tiba-tiba dan bersifat berselang atau *intermittent*. Faktanya, meskipun virus tersebut telah menyebabkan lebih dari 20 kejadian wabah penyakit sejak diidentifikasi pada tahun 1976, virus tersebut menyebabkan kematian yang

³³ Beyer C., *The European Union As A Security Policy Actor: The Case Of Counterterrorism*. European Foreign Affairs Review, Vol. 13, 2008, h. 293-325.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Maier-Knapp, N., *A Friend In Need, A Friend In Deed? ASEAN-EU Interregionalism In The Light Of Non-Traditional Security Crises In South-East Asia*, Current Research on Southeast Asia, Vol. 3 No.1, 2010, h. 76-100.

³⁶ Centers for Disease Control and Prevention, 2014, *Ebola Outbreak in West Africa (Guinea, Liberia, Sierra Leone, and Nigeria)*, <http://www.cdc.gov/vhf/Ebola/outbreaks/guinea/index.html> diakses tanggal 6 September 2014.

³⁷ WHO, *Ebola response roadmap*, Geneva: World Health Organization. 2014.

³⁸ Centers for Disease Control and Prevention, *Outbreaks Chronology: Ebola Hemorrhagic Fever*, Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention, 2014, <http://www.cdc.gov/vhf/Ebola/resources/outbreak-table.html#eighteen>, diakses tanggal 6 September 2014

jumlah totalnya hanya berkisar di angka 1600 sebelum tahun 2014. Kasus yang terbesar terjadi di Uganda pada tahun 2000-2001, dimana wabah Ebola telah membunuh 425 orang.³⁹

Di awal 2014, penyakit Ebola muncul di daerah terpencil di Guinea yang berbatasan dengan negara Sierra Leone dan Liberia. Guinea, Sierra Leone, dan Liberia merupakan negara-negara miskin sumber daya yang sering dilanda wabah penyakit berbahaya, seperti malaria dan penyakit bersifat endemik lainnya, beberapa di antaranya termasuk penyakit Ebola ini. Meskipun ada gambaran umum bahwa virus Ebola biasanya muncul secara tiba-tiba dan misterius dari kawasan hutan, namun situs serangan virus-virus berbahaya sebetulnya mudah dikenali; wabah demam berdarah, misalnya, hampir setiap saat muncul dan terjadi di daerah di mana sistem ekonomi dan sistem kesehatan publiknya telah rusak karena perang saudara berkepanjangan atau sistem pembangunan yang gagal.⁴⁰ Faktor biologis dan ekologis dapat mendorong munculnya virus dari kawasan hutan, namun lanskap sosial politik di sebuah negara jelas menentukan dimana virus akan menyebar dari sana- apakah akan menjadi sebuah kasus yang terisolasi atau sebuah wabah yang besar dan berkelanjutan.

D. Wabah Ebola dan Peningkatan Kerjasama Regional

Meskipun jumlah kematian semakin meningkat dan penyebaran regional virus Ebola di Afrika semakin meluas, dunia internasional belum menanggapi hal tersebut secara serius, hingga dua petugas kesehatan Amerika dan seorang pendeta Spanyol terinfeksi.⁴¹

³⁹ Centers for Disease Control and Prevention, *Outbreaks Chronology: Ebola Hemorrhagic Fever*, Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention, 2014. <http://www.cdc.gov/vhf/Ebola/resources/outbreak-table.html#eighteen>, diakses tanggal 6 September 2014.

⁴⁰ Bausch D.G., Feldmann H., Geisbert T.W., *Outbreaks of filovirus hemorrhagic fever: time to refocus on the patient*, *Journal of Infectious Disease*, Vol. 196, Suppl. 2, 2007, h. 136-141; Feldmann H., Geisbert T.W., *Ebola Haemorrhagic Fever*, *Lancet* Vol. 377, 2011, h. 849-862.

⁴¹ CNN, 2014, *How The World Reacted As Ebola Outbreaks*, <http://edition.cnn.com/interactive/2014/11/health/ebola-outbreak-timeline/>, diakses 12 November 2014.

Tanggapan internasional terhadap wabah virus Ebola di Afrika Barat, yang diproyeksikan untuk menginfeksi sekitar 20.000 orang dengan angka kematian lebih dari 50%⁴² terkesan lamban. Kasus pertama yang diidentifikasi, *index case*, adalah anak 2 tahun dari Guinea, meninggal pada bulan Desember 2013. Kasus ini lalu diikuti dengan penyebaran virus Ebola yang ditemui pada kelompok-kelompok lain pada tanggal 22 Maret 2014, dan kemudian dengan cepat menyebar ke Liberia dan Sierra Leone. Penyakit Ebola lalu menyusup ke Nigeria dan, kemudian, Senegal, melalui perjalanan udara. Akan tetapi *World Health Organisation* (WHO) baru mendeklarasikan suatu kondisi darurat, *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) pada tanggal 8 Agustus 2014, yang lalu disusul dengan merilis acuan penanggulangan berupa *Ebola response roadmap Ebola*,⁴³ pada 28 Agustus, atau berselang 5 bulan setelah virus diketahui menyebar ke berbagai negara.

Masyarakat internasional memberikan dukungan untuk negara-negara yang terkena dampak wabah Ebola di bawah koordinasi WHO. Berbagai badan internasional yang terlibat dalam upaya ini adalah *African Development Bank* (ADP), *World Food Program* (WFP), *the United Nations Humanitarian Air Service* (UNHAS), Uni Eropa dan Bank Dunia. Selain itu, bantuan lembaga internasional dalam bentuk bantuan keuangan, bantuan teknis, dan pengiriman logistik, seperti alat pelindung, juga dilakukan. Organisasi seperti *The International Rescue Committee* (IRC), *Doctors Without Borders* (MSF), and *the International Federation of Red Cross dan Red Crescent Societies* (IFRC) adalah sebagian dari organisasi tenaga medis

⁴² Centers for Disease Control and Prevention, 2014, *Outbreaks Chronology: Ebola Hemorrhagic Fever*, Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention, <http://www.cdc.gov/vhf/Ebola/resources/outbreak-table.html#eighteen>, diakses tanggal 6 September 2014; Centers for Disease Control and Prevention, 2014, *Ebola outbreak in West Africa* (Guinea, Liberia, Sierra Leone, and Nigeria), <http://www.cdc.gov/vhf/Ebola/outbreaks/guinea/index.html> diakses tanggal 6 September 2014.

⁴³ WHO, *Ebola Response Roadmap*, Geneva: World Health Organization. 2014.

internasional yang turut terjun membantu mengatasi wabah Ebola tersebut.⁴⁴

Selain menerapkan upaya pengendalian yang ketat, pengembangan dan penyebaran vaksin dan pengobatan antivirus perlu dipercepat. Perawatan medis yang memadai dapat mengurangi tingkat kematian kasus secara substansial. Upaya ini terbukti menekan tingkat kematian ke titik yang jauh lebih rendah -23 persen dari seluruh kasus- saat terjadi penyebaran virus Marburg di Jerman.⁴⁵

Tragedi yang muncul akibat wabah ini sebenarnya dapat dihindari apabila suatu negara memiliki sumber daya manusia dan sistem kesehatan yang memadai. Tindakan yang perlu segera dilakukan adalah memperbaiki keterbatasan yang dimiliki oleh negara-negara dunia ketiga. Negara-negara berpenghasilan rendah jelas tidak mampu untuk menyediakan infrastruktur di bidang kesehatan yang diperlukan untuk pencegahan wabah penyakit. Negara-negara yang terkena dampak wabah saat ini, tidak memiliki laboratorium, penyuluh kesehatan, dan tenaga klinis yang cukup. Selain itu, juga diperlukan peralatan pengendalian infeksi, persediaan, dan protokol isolasi; pelatihan tenaga medis; fasilitas laboratorium dengan fasilitas *biosafety*; fasilitas kesehatan, termasuk unit isolasi yang aman; dan sistem komunikasi yang efektif agar dapat memberikan informasi kesehatan ke publik sesegera mungkin.

Oleh karena itu, selain respon yang cepat untuk menghentikan wabah ini, sebuah sistem yang tepat harus diterapkan untuk mencegah terjadinya tragedi ini kembali. Seringkali negara-negara yang terdampak wabah menggunakan fasilitas kesehatan ala militer untuk melindungi sebagian besar warga lainnya. Isolasi tersebut juga tidak dilengkapi dengan fasilitas perawatan, air bersih atau

makanan yang cukup bagi para korban wabah. Kegagalan untuk membangun sistem kesehatan yang memadai ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Peraturan. Peraturan internasional ini menyebutkan bahwa setiap negara harus mengembangkan kapasitas dan fasilitas untuk mendeteksi, menilai, melaporkan, dan menanggapi keadaan darurat kesehatan yang dapat membawa ancaman global.⁴⁶

Pada tahun 2001, para kepala negara Perserikatan Afrika pernah menyetujui Deklarasi Abuja, di Nigeria dimana setiap pemerintahan diwajibkan untuk mengalokasikan minimal 15% dari anggaran nasionalnya untuk sektor kesehatan. Hanya satu negara Afrika telah mencapai target itu. Secara keseluruhan, hingga 2011, 26 negara telah meningkatkan proporsi pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk kesehatan dan 11 negara malah mengurangi alokasi dana kesehatannya. Sedangkan 9 negara, tidak menunjukkan itikad yang jelas.⁴⁷

Sistem Kesehatan Internasional sesuai Peraturan Kesehatan Internasional 2005 akan membantu beberapa negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk membangun kemampuan mereka untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas. Disamping itu, dorongan sosial melalui itikad politik juga diharapkan dapat mengumpulkan dana yang substansial untuk memulai sistem tersebut. Dana yang terkumpul melalui *US President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR)* dan *the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria* merupakan contoh keberhasilan perwujudan dukungan politik untuk memobilisasi kesadaran sosial penduduk di suatu negara.⁴⁸

Penjabaran mengenai bahaya wabah Ebola menunjukkan bahwa asosiasi regional seperti ASEAN perlu mengembangkan kerangka

⁴⁴ Salaam-Blyther, T., 2014, *The 2014 Ebola Outbreak: International and U.S. Responses*, <https://www.hsdl.org/?view&did=757151>, diakses 6 September 2014.

⁴⁵ Bertherat E., Talarmin A., Zeller H., *Democratic Republic of the Congo: between civil war and the Marburg virus*, International Committee of Technical and Scientific Coordination of the Durba Epidemic, Med Trop (Mars), Vol. 59, 1999, h. 201-204.

⁴⁶ WHO, *International Health Regulations (2005)*, Second Edition, Geneva: World Health Organization. 2008.

⁴⁷ WHO, 2011, *The Abuja Declaration: Ten Years On*, http://www.who.int/healthsystems/publications/abuja_declaration/en/, diakses 6 September 2014.

⁴⁸ Gostin, L.O., *Global Health Law*, Cambridge, MA: Harvard University Press. 2014

kerjasama yang jauh lebih canggih khususnya untuk menghadapi ancaman keamanan non-tradisional. ASEAN perlu berkonsentrasi untuk mengembangkan instrumen kerjasama hukum dan peradilan yang berlaku di seluruh negara anggotanya, dan juga memiliki instrumen kontrol perbatasan eksternal. Efektivitas instrumen-instrumen tersebut akan meningkat apabila terdapat kemauan negara anggota untuk menyerahkan sebagian kecil hak prerogatif terhadap kedaulatan, tradisi hukum dan administrasi pemerintahan mereka kepada ASEAN.

Faktor utama yang selama ini menghambat ASEAN untuk mencapai hal diatas, adalah keterbatasan sumber daya, keragaman sistem politik negara anggota dan keengganan mereka untuk menerima campur tangan pihak asing. Meskipun demikian, penegakan APSC dan ASEAN Charter yang tercermin dalam ACCT memberikan nuansa baru pada kerjasama negara anggota ASEAN dalam sebuah ikatan hukum. Untuk pertama kalinya, negara-negara anggota ASEAN menyepakati sebuah instrument hukum yang bersifat mengikat guna memberikan payung hukum bagi tindakan melawan terorisme dan kebijakan regional untuk bersama-sama melawan dan mencegah segala bentuk kegiatan terorisme. Tentunya, kesepakatan ACCT ini diharapkan menjadi batu pijakan bagi terciptanya mekanisme kerjasama regional yang lebih mengikat di bidang-bidang lainnya.

ASEAN memang tidak memiliki kemampuan operasional yang seragam dalam penanggulangan ancaman keamanan, sehingga sebagian besar upaya pengamanan selalu dilakukan secara *ad-hoc*, melalui hubungan bilateral/inisiatif antar negara-negara ASEAN dan mitra di luar ASEAN, seperti Amerika Serikat dan sekutunya.⁴⁹ Di bawah tekanan ancaman terorisme, negara-negara anggota ASEAN bersedia bertemu dan berdiskusi pada tingkat bilateral dan trilateral, mencoba

⁴⁹ Singh D. dan Acharya A., "Regional responses to terrorism in Southeast Asia." dalam *Terrorism In South And Southeast Asian In The Coming Decade*. Singh, D. (ed), Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 2009.

untuk mengurangi rasa saling curiga dan memperbaiki iklim regional untuk membangun sistem hukum baru yang mampu mengelola ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip non-interferensi bukanlah sebuah dogma yang paten, dan ASEAN secara signifikan telah berkembang menuju tingkat kelembagaan yang lebih canggih. Sehingga langkah-langkah yang sama seharusnya diperkenalkan di bidang bantuan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk menanggulangi dan merespon ancaman keamanan baik yang dibuat alam atau ulah manusia.

Analisa secara keseluruhan menunjukkan bahwa institusi regional seperti ASEAN semestinya mulai lepas dari sebuah "ruang statis" dan menyesuaikan diri dengan perubahan sistemik yang terjadi di dunia secara cepat dan tepat. Wabah penyakit Ebola, sebagai salah satu bentuk ancaman keamanan non-tradisional, menuntut perilaku ASEAN untuk tidak lagi sekedar bersikap reaktif terhadap perubahan struktural dari lingkungan keamanan internasional. ASEAN perlu meningkatkan kompetensi dan kapasitas mereka untuk menyusun rencana yang koheren dan strategis dalam penanggulangan dan tindakan terhadap isu-isu keamanan non-tradisional.

III. KESIMPULAN

Seiring dengan mengaburnya garis batas antar negara akibat perkembangan globalisasi yang sangat pesat beberapa dekade terakhir membuat isu-isu keamanan non tradisional semakin berkembang dan mengemuka menjadi masalah global. Keleluasaan mobilitas antar negara menjadikan penyakit menular yang semula hanya menjadi perhatian satu negara sebagai ancaman bersama dan penguatan upaya kolektif pun diperlukan untuk bersama-sama menghadapi ancaman tersebut.

Pemaparan diatas mengenai penyebaran virus Ebola yang tengah menjadi perhatian dunia saat ini membangkitkan kesadaran bahwa Ebola tidak lagi menjadi domain bidang ilmu kesehatan saja tetapi merambah menjadi

isu keamanan internasional. Isu ancaman keamanan yang secara tradisional hanya didefinisikan dalam batasan sempit isu-isu yang mengancam kedaulatan suatu negara telah mencapai kompleksitas dan menyentuh pada level keamanan insani (*human security*). Perspektif kontemporer tentang isu-isu ancaman keamanan menjadikan Ebola sebagai ancaman keamanan non-tradisional yang membutuhkan perhatian dan kerja sama internasional.

Wacana penguatan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang menuju kearah pembentukan komunitas bersama membuat upaya-upaya kolektif untuk menghadapi ancaman non tradisional sebagai suatu keniscayaan. Sebagai organisasi regional yang berpegang pada aturan prosedural dan konsensus, ASEAN telah menjadi contoh bagi organisasi-organisasi regional lainnya. Keberhasilan penanggulangan SARS dalam satu dekade terakhir menjadikan ASEAN sebagai rujukan dalam upaya kolektif manajemen penanggulangan penyakit menular berbahaya. Dengan penguatan integrasi ASEAN, isu-isu yang dihadapi tentu saja akan semakin kompleks, sehingga ASEAN tetap harus meningkatkan dialog diantara negara-negara anggotanya terutama untuk isu-isu yang sensitif.

DAFTAR PUSTAKA

Abrahamsen, R., dan Williams M. C., *Security beyond the State: Private Security in International Politics*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

Allan R, *The Progression from Endemic to Epidemic Lassa Fever in War-Torn West Africa*, *Emerging Diseases*, pada Saluzzo J.F. dan Dodet B., *Emergence and Control of Rodent-borne Diseases: Hantaviral and Arenal Diseases*, Vol. 2, 1998.

Amer R, *The Asian Peace: What is the role for the Association of Southeast Asian Nations*

(ASEAN)?, *International Studies Association*, 49th Annual Convention, San Francisco, 2008.

Annan, K., 2002, "We Can Love What We Are, Without Hating What—and Who—we Are Not' Secretary-General Says in Nobel Lecture", SG/SM/8071, December 10, 2001. <http://www.un.org/News/Press/docs/2001/sgsm8071.doc.htm>, diakses 6 September 2014.

Barkin, J. S. dan Cronin, B, *The State and the Nation: Changing Rules and the Norms of Sovereignty in International Relations*. *International Organization*, Vol. 48 No.1, 1994.

Bausch D., *Of Sickness Unknown: Death, and Health, in Africa*, *United Nations Chronicle*, Vol. 38, 2001.

Bausch D., Rollin P., *Responding to Epidemics of Ebola Hemorrhagic Fever: Progress and Lessons Learned from Recent Outbreaks in Uganda, Gabon, and Congo*, *Emerging Infections*, Vol. 6, 2004.

Bausch D.G., Feldmann H., Geisbert T.W., dkk, *Outbreaks of filovirus hemorrhagic fever: time to refocus on the patient*, *Journal of Infectious Disease*, Vol. 196, Suppl. 2, 2007.

BBC, Ebola Outbreak Deaths Pass 5.000, <http://www.bbc.com/news/world-africa-30028859>, diakses pada 2 November 2014.

Beck, U., *World Risk Society*, Polity Press, Cambridge, 1999.

Bermejo M., Rodriguez-Teijeiro J.D., Illera G., Barroso A., Vila C., *Ebola Outbreak Killed 5000 Gorillas*, *Science*, Vol. 314, 2006.

Bertherat E., Talarmin A., Zeller H., *Democratic Republic of the Congo: between civil war and the Marburg virus*, International Committee of Technical and Scientific Coordination of the Durba Epidemic, *Med Trop (Mars)*, Vol. 59, 1999.

Beyer C., *The European Union as a Security Policy Actor: the Case of Counterterrorism*, *European Foreign Affairs Review*, Vol. 13, 2008.

- Biscop S., *The European Security Strategy: A Global Agenda for Positive Power*, Ashgate Publishing, Aldershot, 2005.
- Buzan, B., Ole, W. and de Wilde, J., *Security: A New Framework for Analysis*, Lynne Rienner, Boulder, 1998.
- Centers for Disease Control and Prevention, 2014, *Outbreaks Chronology: Ebola Hemorrhagic Fever*, Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention, <http://www.cdc.gov/vhf/Ebola/resources/outbreak-table.html#eighteen>, diakses tanggal 6 September 2014
- Centers for Disease Control and Prevention, 2014, *Ebola outbreak in West Africa (Guinea, Liberia, Sierra Leone, and Nigeria)*, <http://www.cdc.gov/vhf/Ebola/outbreaks/guinea/index.html>, diakses tanggal 6 September 2014.
- CNN, 2014, *How the World Reacted as Ebola Outbreaks*, <http://edition.cnn.com/interactive/2014/11/health/ebola-outbreak-timeline/>, diakses 12 November 2014.
- Cooke, P., *The Evolution of Biotechnology in Bioregions and their Globalisation*. *International Journal of Biotechnology*, vol. 10, No. 5, 2008.
- Cossa, Ralph A., dan Khanna, Jane, *East Asia: Economic Interdependence and Regional Security*, *International Affairs*, Vol. 73 No. 2, 1997.
- Elbe, S., *Security and Global Health: Towards the Medicalization of Insecurity*, Polity Press, Cambridge, 2010.
- Feldmann H., Geisbert T.W., *Ebola Haemorrhagic Fever*, *Lancet*, Vol. 377, 2011.
- Furedi, E., *Politics of Fear: Beyond Left and Right*, Continuum, London, 2005.
- Gostin, L.O., *Global Health Law*, Harvard University Press, Cambridge, 2014.
- Hameiri, S., *Governing Disorder: The Australian Federal Police and Australia's New Regional Frontier*, *The Pacific Review*, Vol. 22 No. 5, hal. 549–574.
- Hansen, L., dan Nissenbaum H., 2009, *Digital Disaster, Cyber Security, and the Copenhagen School*. *International Studies Quarterly*, Vol. 53 No. 4, 2009.
- Harvey, D., *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford University Press, Oxford, 2005.
- Harris, Stuart dan Andrew Mack (ed), *Asia-Pacific Security: The Economics-Politics Nexus*, hal. 52-80, Allen and Unwin, Sydney, 1997.
- Hu, W., *Economic and Security Cooperation in Northeast Asia: A Chinese Perspective*, pada Tsuneo Akaha (ed), *Politics and Economics in Northeast Asia: Nationalism and Regionalism in Contention*, St. Martin's Press, New York, 1999.
- Jayasuriya, K., *Beyond Institutional Fetishism: From the Developmental to the Regulatory State, New Political Economy*, Vol. 10 No. 3, 2005.
- Jayasuriya, K., dan Rodan G., *Beyond Hybrid Regimes: More Participation, Less Contestation in Southeast Asia, Democratization*, Vol. 14 No. 5, 2007.
- Jezeq Z., Szczeniowski M.Y., Muyembe-Tamfum J.J., McCormick J.B., Heymann D.L., *Ebola Between Outbreaks: Intensified Ebola Hemorrhagic Fever Surveillance in the Democratic Republic of the Congo, 1981–1985*, *Journal Infectious Disease*, Vol. 179, Suppl 1, 1999 .
- Keil, Roger dan Rianne Mahon (ed), *Leviathan Undone? Towards a Political Economy of Scale*, UBC Press, Vancouver, 2009.
- King, G., dan Murray, C. J. *Rethinking human security*. *Political Science Quarterly*, Vol. 116 No. 4, 2001.
- Krause K, *Culture and Security; Multilateralism, Arms Control and Security Building*, Frank Cass, London, 1999.
- Lahm S.A., Kombila M., Swanepoel R., Barnes R.F., *Morbidity and Mortality of Wild Animals in relation to Outbreaks of Ebola Haemorrhagic Fever in Gabon, 1994–2003*, *Trans R Soc Trop Med Hyg*, Vol. 101, 2007.

- Leroy E. M., Rouquet P., Formenty P., Souquiere S., Kilbourne A., *Multiple Ebola Virus Transmission Events and Rapid Decline of Central African Wildlife*, *Science*, Vol. 303, 2004.
- Mabee, B., *The Globalization of Security: State Power, Security Provision and Legitimacy*, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2009.
- Maier-Knapp, N., *A friend in need, a friend in deed? ASEAN–EU Interregionalism in the light of non-traditional security crises in South-East Asia*, *Current Research on Southeast Asia*, Vol. 3 No.1, 2010.
- Newman, E., *Human Security and Constructivism*, *International Studies Perspectives*, Vol. 2, No. 3, 2001.
- Pearson, J., *Asia Must Do More to Help Global Ebola Fight*, Jakarta Post edisi 5 November 2014.
- Pinzon J.E., Wilson J.M., Tucker C.J., Arthur R., Jahrling P.B., *Trigger Events: Enviroclimatic Coupling of Ebola Hemorrhagic Fever Outbreaks*, *Journal of Trop Med Hyg*, Vol. 71, 2004.
- Purcell, M. dan Joseph N., *Pushing the Boundary: State Restructuring, State Theory, and the Case of U.S.–Mexico Border Enforcement in the 1990s*, *Political Geography*, Vol. 24 No. 2, 2005.
- Salaam-Blyther, T., 2014, *The 2014 Ebola Outbreak: International and U.S. Responses*, <https://www.hsdl.org/?view&did=757151>, diakses 6 September 2014.
- Sassen, S., *Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages*, Princeton University Press, Princeton, 2006.
- Singh D. (ed) *Terrorism in South and Southeast Asian in the coming decade*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2009.
- United Nations Development Programme, *Human Development Report 1994*, Oxford University Press, New York and Oxford, 1994.
- Van Ginkel, H. dan Newman, E., *In Quest for 'Human Security'*, *Japan Review of International Affairs*, Vol. 14, No. 1, 2000.
- WHO, *International Health Regulations (2005)*, Second Edition, World Health Organization, Geneva, 2008.
- WHO, 2011, *The Abuja Declaration: Ten Years On*, http://www.who.int/healthsystems/publications/abuja_declaration/en/, diakses 6 September 2014.
- WHO, *Ebola Response Roadmap*, World Health Organization, Geneva, 2014.
- WHO, *WHO Welcomes Decision to Establish United Nations Mission for Ebola Emergency Response* <http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/ebola-emergency-response/en/>, diakses pada 12 November 2014